

SUMBER BERITA

RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Aset Rp 21 M Tanpa Keberadaan

Di Dinkes dan RSUD Tais

SELUMA - Belum lagi selesai masalah temuan BPK tahun 2019 atas realisasi belanja tahun 2018 lalu, saat muncul masalah lainnya. Itu terkait aset Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Tais yang totalnya mencapai Rp 21 miliar tidak diketahui keberadaannya. Rincian Rp 17 miliar di Dinkes dan Rp 4 miliar di RSUD Tais.

Menyikapi temuan BPK ini, Wabup Seluma, Drs

Suparto, M.Si mengumpulkan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Seluma. Mulai dari Dinkes, PUPR, Dispdik, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup hingga RSUD Tais, kemarin (26/11). Suparto meminta agar semua OPD merapikan dan mendata semua aset yang dimiliki.

"Ya hari ini (kemarin, red) saya kumpulkan semua OPD. Berkaitan pemeriksaan BPK yang sedang berlangsung, menyoroti masalah aset. Karena ada aset yang dilaporkan OPD

namun tidak diketahui keberadaannya," jelas Suparto.

Suparto meminta permasalahan aset ini harus ditanggapi cepat. Seperti diketahui sebelumnya, aset ini lah yang menjadi penghalang Pemkab Seluma untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. "Saya akan pantau terus tindak lanjutnya oleh OPD. Ini harus cepat jangan dilalaikan lagi, saya tunggu

laporannya," kata Suparto. Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Seluma, Deddy Ramdhani, SE, M.SE, MA melalui Kabid Aset, Erwin Alfarid, ST mengatakan dari hasil audit LHP BPK RI Tahun 2019 ini di 12 OPD. Diketahui bahwa di Dinkes ada aset senilai Rp 17 miliar yang tidak diketahui keberadaannya.

Aset tersebut berupa peralatan dan mesin sebanyak 48 unit senilai Rp 5,7 miliar. Lalu kendaraan bermotor sebanyak 69 unit dengan

nilai Rp 5,2 miliar bersumber dari APBN dan APBD Provinsi yang telah dicatat pada daftar inventaris barang, namun surat-suratnya tidak ada. Sehingga dianggap tidak ada oleh Auditor BPK yang melakukan audit. Selain itu asumsi penyusutan aset tetap yang tidak dapat di telusuri dan tidak diyakini kewajarannya untuk alkes senilai Rp 7,484 miliar.

"Surat menyurat atau dokumen hibah kendaraan dari Pemkab Bengkulu Selatan saat pemekaran dan juga hibah dari Provinsi, tidak ada. Sehingga oleh auditor BPK dianggap tidak ada," terang Erwin.

Sementara untuk aset berupa alat kesehatan (alkes) di RSUD Tais senilai Rp 4 miliar tercatat di daftar inventaris aset. Namun keberadaan alkes tidak diketahui. Sehingga RSUD Tais juga diminta untuk segera menindaklanjutinya.

"Untuk pembenahan aset berlaku untuk semua OPD. Agar ke depan semua aset dapat diinventarisir, tidak lagi menjadi temuan BPK di tahun mendatang," sampai Erwin.

Terpisah Kadinkes Seluma, Rudi Sawaludin, S.Sos belum dapat

menjelaskan terkait hal ini. Karena masih dinas luar.

"Na, saya belum dapat laporan terkait ini. Besok saja (hari ini, red) temui saya di kantor. Hari ini (kemarin) saya masih dinas luar," pinta Rudi.

Sementara itu Dirut RSUD Tais, dr. Wiwin Herwini belum dapat dikonfirmasi. Di hubungi melalui ponselnya juga pesan WhatsApp (WA) belum didapati jawaban hingga berita ini disusun. (aba)